

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Studi Kepustakaan Menurut Sugiyono (2017:291) “Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seseorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.”

##### **2.1.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

###### **2.1.1.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Hakim mengutip dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah :

“Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.”

Menurut Mahmudi (2016:19) yang dimaksud dengan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah :

“Kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terhadap tahap-tahap, prosedur, perangkat, peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah”.

Tujuan akuntansi itu sendiri adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak di dalam

perusahaan maupun pihak di luar perusahaan. (Suhayati E. & Sri Dewi A., 2014:2). Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Fitrawansah (2015:132):

“Sistem akuntansi adalah suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka akan sulit bagi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif seperti disebutkan dalam PP No. 71/2010 yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.”

Menurut Dwi & Mahfud (2015:7) yang dimaksud dengan akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemda dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.”

Dari uraian di atas diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian sistem mulai dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Akuntansi keuangan daerah berperan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal.

### **2.1.1.2 Indikator Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:59) indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan
  - a. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
  - b. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
  - c. Memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran
  - a. Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
  - b. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling *up to date*.
  - c. Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.

- d. Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
  - e. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
  - f. Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan

Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Yang menjadi Indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menurut Mendagri No.29 tahun 2002 yaitu:

a. Pencatatan

Bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dan menggunakan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

b. Penggolongan dan Pengikhtisaran

Adanya penjurnalan dan melakukan posting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan.

c. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, necara, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut oleh bagian keuangan akan dilaporkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Pihak-pihak yang memerlukannya antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Badan Pengawasan Keuangan; Investor; Kreditor; dan donatur; Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah; Rakyat; Pemerintah Daerah lain; dan Pemerintah Pusat yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Sedangkan menurut Permadi (2013) indikator yang digunakan untuk mengukur sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. Karena sistem akuntansi pemerintah merupakan pedoman bagi akuntansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.
- b. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya. Prosedur Pencatatan akuntansi pemerintahan daerah harus didasarkan pada kesesuaian dengan standar pencatatan akuntansi yang berlaku umum

- c. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik. Laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah. laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik untuk mengukur kinerja secara periodik dan untuk kepentingan dalam pengambilan keputusan.

## **2.1.2 Kualitas Sumber Daya Manusia**

### **2.1.2.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia**

Menurut Pasolong (2013:5) mengemukakan bahwa “kualitas sumber daya manusia merupakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan dan moral yang tinggi.” Sedangkan menurut Widodo (dalam Aisyah, 2017:132) sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut P. Kotler dan K. Keller dalam I Putu Agus dan Oka Suryadinatha (2020:9) kualitas sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang diutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.”

Dan menurut Rivai, Veithzal dalam I Putu Agus dan Oka Suryadinatha (2020:9) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional.

Dari uraian di atas diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

### **2.1.2.2 Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia**

Setelah mengemukakan beberapa pengertian-pengertian kualitas sumber daya manusia menurut para ahli diatas, peneliti akan membahas tentang indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 indikator sumber daya manusia (pegawai) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

Menurut Mamik (2017:75) untuk ukuran kinerja kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki empat kategori, yaitu:

1. Indikator kuantitatif yang mengindikasikan jumlah atau angka, contohnya berupa angka tingkat keluar masuk karyawan dan produktivitas karyawan.
2. Indikator praktis yang mengindikasi proses yang sedang berjalan, contohnya berupa nilai investasi sumber daya manusia dan jumlah hari pelatihan bagi karyawan.
3. Indikator sinyal yang secara spesifik menunjukkan gambaran apakah perusahaan sedang maju atau sebaliknya, contohnya besarnya pertumbuhan produktivitas karyawan pertahun selama lima tahun terakhir.
4. Indikator yang menunjukkan efek suatu kendali perusahaan terhadap perubahan, contohnya pengaruh pelatihan terhadap perubahan, contohnya pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan karyawan, pengaruh peningkatan motivasi terhadap kinerja karyawan dan pengaruh teknologi terhadap produktivitas karyawan.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) melalui Sulaiman Asang (2019:3) indikator ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari:

1. Kesehatan (kemampuann fisik) dengan angka harapan hidup.



2. Pendidikan dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Berikut penjelasan dari indikator kualitas sumber daya manusia:

1. Kemampuan Fisik (kesehatan)

Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi sembilan kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja dari tugas-tugas fisik. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan fisik (kesehatan) ini meliputi :

- a. Memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani
- b. Memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi

2. Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat, pada nilai yang tinggi. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. Adapun indikator dalam mengukur kemampuan intelektual (kecerdasan) ini meliputi :

- a. Memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
- b. Memiliki tingkatan ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, baik yang tersedia di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

- c. Memiliki penguasaan bahasa, meliputi bahasa nasional, bahasa ibu (daerah) dan sekurang-kurangnya satu bahasa asing.
- d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi.

### **2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Kasmir (2017:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” Sedangkan menurut Harahap (2015 : 105), laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan.”

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 dikemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). (Moermahadi S. Djanegara, 2017:1). Karena tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (Suhayati E. & Sri Dewi A., 2014:16)

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dan sebagai alat komunikasi bagi pihak yang berkepentingan dengan aktivitas suatu entitas tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.

### **2.1.3.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

#### **1. Relevan**

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*) dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat

dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu Informasi yang termuat laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Indikator kualitas laporan keuangan menurut Zamzami dan Nusa (2016:9) adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Setiap menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebaiknya disusun secara sistematis agar dapat dipahami. Dengan karakter dapat dipahami ini tentunya para pengguna juga memiliki pengetahuan yang memadai. Untuk itu, laporan keuangan yang disusun juga harus disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Relevan

Laporan keuangan yang disusun harus relevan bagi pengguna dalam mengambil keputusan, sehingga setiap informasi yang disajikan di laporan keuangan harus terkait dengan tujuan penyusunan laporan keuangan sehingga informasi tersebut memberikan nilai prediksi, nilai masukan, dan ketepatan waktu. Menurut PSAK (2014), yang dimaksud informasi memiliki kualitas relevan adalah jika dapat memengaruhi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.

3. Keandalan

Setiap laporan keuangan harus dapat diandalkan oleh para pemakai laporan keuangan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan harus disajikan

dengan akurat, benar, sesuai dengan kenyataan, tidak ada rekayasa sedemikian rupa dengan tujuan hanya untuk memuaskan pihak-pihak tertentu sehingga informasi tersebut harus netral, disajikan dengan jujur, dan dapat diverifikasi.

#### 4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang sama untuk perusahaan yang berbeda dan pengguna dapat membandingkan laporan keuangan untuk melihat trend dan kinerja keuangan. Untuk itu, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan secara konsisten dengan kebijakan yang sama agar dapat dibandingkan antarentitas dan antarperiode yang berbeda.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:60) “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.” Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.” Sedangkan menurut Suriasumatri dalam Sugiyono (2017:60), “kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.”

Jadi, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang terkait adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan keterkaitan

antara kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **2.2.1 Keterkaitan antara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) secara keseluruhan pada tahun 2015 mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Artinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan berkualitas apabila mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (Abdullah & Putriasri Pujanira, 2017).

Penelitian ini didukung oleh pernyataan menurut Hadi Jauhari, dkk. (2021):

“Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk penyusunan dan penyajian LKPD, jika standar akuntansi pemerintah diterapkan secara tepat sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah di bidang akuntabilitas keuangan menjadi salah satu penentu kualitas LKPD.”

Di perkuat oleh Triwardana (2017):

“Adanya Kehadiran sebuah sistem akuntansi sangat berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan. Untuk mampu membuat informasi berupa laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD. Kehadiran dari adanya sistem akuntansi benar-benar berperan penting, hal tersebut dikarenakan peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan.”

Berdasarkan hasil penelitian Dahri Adi Patra, dkk. (2016) menyebutkan bahwa:

“Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, hal itu dikarenakan dengan adanya sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah



maka akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkanpun akan memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggung jawaban saja, namun laporan keuangan juga dijadikan ukuran kinerja suatu instansi tersebut.“

Berdasarkan hasil penelitian Erwin Siahaya, dkk. (2018) penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kualitas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan.

Sedangkan hasil penelitian Suci Rahmadani (2015) menyatakan bahwa:

“Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan, dapat dipahami dan dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan dalam pengambilan keputusan.”

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa untuk mampu membuat informasi berupa laporan keuangan yang akurat, maka pengolahan datanya membutuhkan sebuah alat atau sistem yang mendukung yaitu SAKD, hal ini karena peranannya dalam memastikan kualitas informasi pada laporan keuangan. Artinya jika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan berkualitas apabila mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh penelitian Putriasri Pujanira (2017).

### **2.2.2 Keterkaitan antara Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam proses pemilihan penyaringan pekerja haruslah dilakukan dengan dengan menetapkan kriteria sesuai dengan tempat yang diperlukan sehingga nantinya dapat memaksimalkan kemampuannya dalam bekerja. (Gumelar, 2017).

Nur Ulfiati (2017) menemukan bahwa :

“Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.”

Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009).

Dan hal ini diperkuat oleh penelitian Indra Satriawan dan Rancana Sari Dewi (2020), yang menyatakan:

“Kualitas dari sumber daya manusia tentunya akan berpengaruh dalam proses penyusunan dan hasil yang diharapkan dari laporan keuangan tersebut. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga tinggi rendahnya kompetensi setiap individu dalam bidangnya akan berpengaruh pada kinerja dan kontribusinya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kesalahan ataupun kekeliruan bisa saja terjadi jika SDM yang bertanggungjawab dibidang tersebut kurang berkompeten sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.”

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Irzal Tawaqal & Suparno (2017) adalah sebagai berikut:

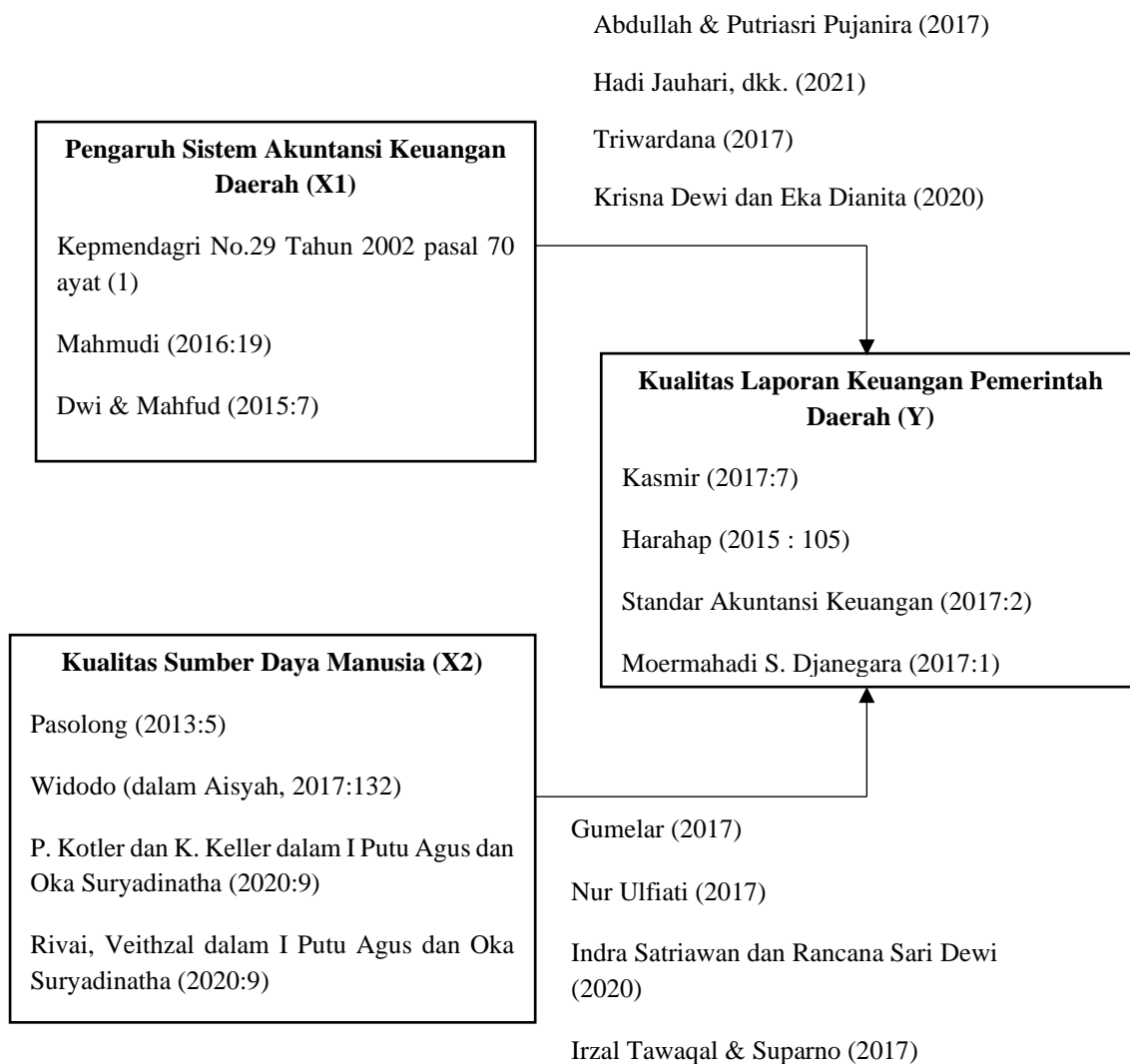
“Kualitas sumber daya manusia mencerminkan tingkat keberhasilan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan yang artinya semakin bagus kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tinggi tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka waktu penyusunan laporan keuangan akan dapat dipersingkat, hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya.”

Dan didukung menurut hasil penelitian Lif Saipullah (2017):

“Jika pegawai keuangan mempunyai kualitas yang baik maka hal ini pula akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan dari penelitian ini juga mendukung teori *stewardship* bahwa sumber daya manusia yang ada tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mementingkan kepentingan dari organisasinya. Sumber daya manusia yang ada di suatu organisasi publik akan selalu meningkatkan kualitasnya dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari organisasi.”

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dalam menyusun laporan keuangan dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Sumber daya manusia yang ada di suatu organisasi publik akan selalu meningkatkan kualitasnya dalam hal menyelesaikan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari organisasi, seperti yang dikemukakan pada penelitian Nur Ulfiati (2017).

Paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Sugiyono (2017:95) berpendapat bahwa hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh

melalui pengumpulan data. Adapun langkah-langkah dalam menguji hipotesis ini dimulai dengan menetapkan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_a$ ), pemilihan tes statistik dan perhitungannya, menetapkan tingkat signifikansi, dan penetapan kriteria pengujian.”

Jadi berdasarkan pendapat Sugiyono, hipotesis penelitian merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan sementara dari penelitian adalah sebagai berikut:

(H1) :Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

(H2) :Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.